

**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR
PETERNAKAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

OLEH

LENNI MARLINA



Tgl. Terima	10 Agustus 05
Asal Dari	fab. peternakan
Banyaknya	1 (satu) eksemplar
Harga	H
Tgl. Terbit	2005/10-08-05

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005**

**KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SUB SEKTOR
PETERNAKAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN BULUKUMBA**

OLEH

LENNI MARLINA

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin
Makassar

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005**

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba

Nama : LENNI MARLINA

Stambuk : I311 99 035

Skripsi ini Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:



Ir. Martha B Rombe MP
Pembimbing Utama



Ir. Veronica Sri Lestari, M.Ec
Pembimbing Anggota



Prof. DR. H. Basit Wello, M.Sc
Dekan

Mengetahui :



Ir. Hastang M.Sc
Ketua Jurusan

Tanggal Lulus : Januari 2005

ABSTRAK

Lenni Marlina. I 311 00 036. *Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.* Di bawah bimbingan Martha B Rombe selaku pembimbing Utama dan Veronica Sri Lestari selaku pembimbing anggota.

Penerimaan pajak untuk sektor peternakan yaitu dari ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda. Sedangkan untuk penerimaan retribusi, daerah Kabupaten Bulukumba memperoleh penerimaan dari retribusi pengangkutan ternak seperti pengangkutan dan pemotongan kambing, ayam buras maupun ayam ras.

Selain populasi ternak yang cenderung mengalami peningkatan, berbagai aktivitas masyarakat dari sub sektor peternakan juga cukup berkembang seperti pemasaran ternak, pemasaran antar pulau dan pengembangan usaha rumah potong hewan. Ini tentunya akan menjadi salah satu sumber pajak dan retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu mengetahui besarnya kontribusi pajak dan retribusi subsektor peternakan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba, sebagai upaya dalam pengambilan kebijakan pengembangan sub sektor peternakan tersebut.

Pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari peningkatan populasi ternak baik ternak besar, kecil maupun ternak unggas serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan sub sektor perdagangan seperti pajak hewan/ternak, retribusi pasar hewan dan rumah potong hewan dan lain sebagainya.

Dari latar belakang diatas maka diadakan penelitian *Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak dan retribusi subsektor peternakan dan kontribusinya terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2004 di Kabupaten Bulukumba.

Persentase yang diberikan oleh sub-sektor peternakan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba semakin meningkat, walaupun masih berkisar dibawah 1,00 %, akan tetapi jika hal ini terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan keluasaan gerak terhadap sub-sektor peternakan untuk berkembang, maka ditahun mendatang akan terbuka banyak pos-pos penarikan retribusi dan pajak ternak, yang akan menunjang dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba yang optimal. Adapun rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan yaitu sebesar 0,02 %.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan inayahNya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis haturkan kepada :

1. Bapak Ir. Martha B Rombe, MP sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Ir. Veronica Sri Lestari, M.Ec sebagai Pembimbing Anggota yang telah banyak memberi masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Peternakan beserta seluruh Staf Dosen dan pegawai yang telah memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Peternakan.
3. Ibu Ir. Martha B Rombe, MP selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Peternakan.
4. Kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan memotivasi serta segenap keluarga yang telah memberikan dorongan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, Terima Kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu tegur sapa dan sumbang saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dunia usaha peternakan.

Makassar, Januari 2005.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
Kegunaan Penelitian	6
TINJAUAN PUSTAKA	
Tinjauan Sub Sektor Peternak	7
Pajak dan Retribusi	9
Pendapatan Asli Daerah	13
METODOLOGI PENELITIAN	
Waktu dan Tempat	15
Metode Pengambilan Data	15
Jenis Penelitian	15
Sumber Data	16

Analisa Data	16
Konsep Operasional.....	16
KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
Keadaan Geografis Daerah.....	18
Keadaan Umum Penduduk.....	19
Keadaan Sosial	20
Perkembangan Sektor Pertanian.....	23
Perkembangan Sub Sektor Peternakan.....	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba .	26
Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Peternakan.....	33
Kontribusi Pajak Dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba	38
KESIMPULAN DAN SARAN	
Kesimpulan	39
Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Perkembangan Populasi Ternak Besar, Kecil Dan Unggas di Sulawesi Selatan.....	3
2.	Populasi Ternak Di Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 – 2003	4
3.	Luas Daerah Menurut Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2004.....	19
4.	Komposisi dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Ada Di Kabupaten bulukumba Tahun 2003.....	20
5.	Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.....	22
6.	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003	23
7.	Target dan Realisasi Pajak dan Penarikan Retribusi Sub-sektor Peternakan Pada Daerah Kabupaten Bulukumba Selama Tahun 1999 Sampai Dengan 2003	32
8.	Besarnya Pajak Kepemilikan Hewan Ternak di Kabupaten Bulukumba..	34
9.	Besarnya Retribusi Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Bulukumba	36
10.	Sumber Penerimaan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Bulukumba	37
11.	Kontribusi Sub-Sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Teks</u>	Hal
1.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan Tahun 2003	41
2.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003	51
3.	Target, Realisasi dan Persentase Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003 ...	52
4.	Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003	57

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan usaha sub sektor peternakan dewasa ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya usaha-usaha yang bergerak dalam sub sektor peternakan, baik usaha budidaya, fattening atau penggemukan, breeding sampai pada bisnis pemasaran komoditas peternakan.

Fenomena tersebut terjadi disebabkan oleh semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan protein hewani yang bersumber daging ternak, telur maupun susu. Perkembangan permintaan ini dapat ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Melihat kenyataan ini maka banyak masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut melalui usaha-usaha sub sektor peternakan.

Bagi pemerintah dengan semakin giatnya berbagai usaha dalam sub sektor peternakan tentunya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setempat melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah dari sub sektor peternakan. Hal ini tentunya diharapkan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

Pajak dan retribusi merupakan persoalan yang menyangkut masyarakat umum dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara tidak akan terlepas dari urusan pajak. Pajak yang diperoleh negara bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat secara merata. Yang dituju adalah

masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material. Maka sudah barang tentu untuk mencapai tujuan itu masyarakat/negara melakukan pembangunan. Sumber-sumber pendapatan pemerintah dari pajak dan retribusi cukup banyak antara lain dari sektor perdagangan, pajak penghasilan, pajak dan retribusi tempat hiburan dan hotel, pajak sub sektor peternakan dan lain-lain.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber daya peternakan yang cukup tinggi, seperti ketersediaan lahan, pakan dan tenaga kerja, serta berbagai perusahaan pembibitan, penggemukan dan lain-lain telah terdapat di daerah ini. Selain itu dukungan pihak pemerintah dengan berbagai kebijakan seperti program pengembangan sub sektor peternakan, grateks 2 Sul-Sel dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat mendukung dalam pengembangan sub sektor peternakan.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas kabupaten. Adapun perkembangan populasi ternak besar, kecil dan unggas di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi Ternak Di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Kabupaten Pada Tahun 2003.

No	Kabupaten	Jenis Ternak (Kor)										Total
		Sapi Perah	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Itik	Ayam Ras	Ayam Kampung	
1	Selayar	-	6.483	3.198	3.774	85.484	607	-	4.915	6.795	234.647	365.903
2	Bulukumba	-	65.631	5.849	25.336	27.255	-	-	59.961	163.578	713.064	1.060.674
3	Bantaeng	-	26.317	2.834	5.477	19.698	-	-	60.030	68.000	491.345	673.701
4	Jeneponto	-	14.934	13.868	19.793	59.175	753	-	93.060	79.261	640.426	921.270
5	Takalar	-	16.401	5.629	1.087	7.194	5	-	184.450	420.500	454.149	1.089.415
6	Gowa	-	69.849	24.871	7.966	27.167	-	5.956	245.654	484.555	817.595	1.683.613
7	Sinjai	27	37.067	7.648	5.425	19.449	-	-	29.306	112.327	612.820	824.069
8	Maros	-	40.396	9.822	4.282	14.788	-	-	265.698	496.470	738.822	1.570.278
9	Pangkajene	-	32.104	11.104	3.413	6.982	-	-	306.266	66.400	585.734	1.012.003
10	Barru	-	33.362	2.059	2.207	9.191	-	-	66.862	74.543	243.292	431.516
11	Bone	-	110.066	5.526	7.396	9.050	-	-	92.995	57.000	1.250.823	1.532.856
12	Soppeng	-	16.960	2.095	6.527	9.922	-	-	189.772	217.268	455.974	898.518
13	Wajo	-	18.195	5.926	5.559	5.131	12	-	82.188	162.372	732.899	1.012.282
14	Sidrap	-	28.082	2.316	19.419	5.358	-	-	411.268	274.402	1.441.242	4.095.843
15	Pinarang	-	35.696	4.781	3.802	14.399	-	3.048	375.928	2.188.158	1.173.489	1.885.545
16	Enrekang	250	32.995	5.321	3.319	24.292	-	-	14.612	12.600	295.665	389.054
17	Luwu	-	11.762	5.662	688	8.072	-	12.250	67.966	404.745	1.100.731	1.611.876
18	Tana Toraja	-	6.446	46.771	5.891	11.258	-	-	37.627	79.900	906.142	1.094.035
19	Palmara	-	25.491	7.939	8.229	62.789	-	234.394	1.308.112	164.113	1.868.623	3.699.690
20	Majene	-	8.051	1.976	597	71.435	-	30.132	60.009	-	139.097	258.439
21	Mamuju	-	63.621	3.452	340	9.492	-	-	172.522	300.000	1.271.360	1.892.802
22	Luwu Utara	-	20.795	7.102	762	8.191	-	-	249.130	289.666	603.045	
23	Makassar	29	1.282	653	78	4.129	-	23.500	4.008	180.285	456.017	651.397
24	Parepare	-	1.692	160	151	5.071	-	4.013	-	-	-	
Total		306	723.678	186.562	141.518	524.972	1.377	505.815	4.114.486	6.262.402	19.152.191	31.613.307

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2003.

Pada Tabel 1, terlihat bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke dua belas dari dua puluh empat kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2002 Kabupaten Bulukumba berada pada pada urutan ketiga untuk populasi ternak besar seperti ternak sapi. Selain itu 69,36 % penduduk bekerja pada sektor pertanian termasuk peternakan yaitu sebesar 92.592 jiwa dari total 370.728 jiwa, selebihnya bekerja pada serta sektor lain, seperti perdagangan, pemerintahan dan lain-lain. Hal ini tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya populasi ternak di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi Ternak Di Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 – 2003

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)				
		1999	2000	2001	2002	2003
1.	Sapi	62.284	63.380	64.496	65.631	85.835
2.	Kerbau	5.363	5.430	5.497	5.849	5.493
3.	Kuda	24.297	24.516	24.736	25.336	25.063
4.	Kambing	25.766	26.243	26.728	27.255	28.006
5.	Ayam ras pedaging	40.566	42.039	43.278	57.252	59.497
6.	Ayam ras petelur	75.337	78.072	80.373	106.326	183.305
7.	Ayam buras	590.976	614.615	639.200	713.064	714.825
8.	Itik	56.296	57.016	57.745	59.961	60.051

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Bulukumba, 2004.

Tabel 2, menunjukkan bahwa populasi semua jenis ternak yang terdapat di Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan bahwa sub sektor peternakan di daerah tersebut cukup berkembang. Melihat kenyataan tersebut tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah dari sub sektor peternakan. Penerimaan pajak untuk sektor peternakan yaitu dari ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda. Sedangkan untuk penerimaan retribusi, daerah Kabupaten Bulukumba memperoleh penerimaan dari retribusi pengangkutan ternak seperti pengangkutan dan pemotongan kambing, ayam buras maupun ayam ras.

Selain populasi ternak yang cenderung mengalami peningkatan, berbagai aktivitas masyarakat dari sub sektor peternakan juga cukup berkembang seperti pemasaran ternak, pemasaran antar pulau dan pengembangan usaha rumah potong hewan. Ini tentunya akan menjadi salah satu sumber pajak dan retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu mengetahui besarnya kontribusi pajak dan retribusi subsektor peternakan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba, sebagai upaya dalam pengambilan kebijakan pengembangan sub sektor peternakan tersebut.

Pendapatan pajak dan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari peningkatan populasi ternak baik ternak besar, kecil maupun ternak unggas serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan sub sektor perdagangan seperti pajak hewan/ternak, retribusi pasar hewan dan rumah potong hewan dan lain sebagainya.

Dari latar belakang diatas maka diadakan penelitian *Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.*

Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba.
2. Apakah dengan meningkatnya PAD, pajak sub sektor peternakan juga akan mengalami peningkatan ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pajak dan retribusi subsektor peternakan dan kontribusinya terhadap total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah tentang kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam pengambilan kebijakan pengembangan sub sektor peternakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Sub Sektor Peternakan

Aktivitas memelihara ternak di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Dari catatan dan peninggalan sejarah terlihat bahwa semenjak zaman kerajaan dulu sudah ada cikal bakal peternakan, ini terlihat jelas di zaman kerajaan Majapahit. Di antara yang paling banyak dipelihara pada saat itu adalah ayam kampung dan itik yang kemudian hari lebih populer dengan sebutan ayam negeri dan itik lokal. Hingga tahun 1970 sebenarnya tidak banyak peternakan yang dapat diandalkan, walaupun sejak tahun 1920-an sudah ditemukan beberapa peternakan itik dan ayam buras kala itu oleh pakar peternakan belanda. Bahkan, sejak tahun 1950-an sudah ada yang membuka peternakan ayam ras galur murni di Jawa Barat. Tetapi semua itu dapat dikatakan sebagai usaha perintis yang tidak memberikan arti secara nasional. Hal ini disebabkan karena periode tersebut kondisi yang tidak memungkinkan, selanjutnya dikatakan bahwa, periode 1970 hingga 1980 merupakan awal kebangkitan peternakan ayam ras, di mulai sejak 1972 hingga tahun 1975 dengan berdirinya pabrik makanan unggas dan pembibitan ayam ras. Tahun 1978 mulailah digalakkan ayam broiler sebagai substitusi daging sapi dan kerbau yang waktu itu memang tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Peternakan ayam broiler meledak hingga tahun 1980-an, bersamaan dengan semakin diterimanya ayam ini dilidah konsumen. (Rasyaf, 1995)

Agribisnis peternakan mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1980-an. Agribisnis peternakan merupakan sebuah sistem pengelolaan ternak secara terpadu dan menyeluruh yang meliputi semua kegiatan mulai dari pembuatan (*manufacture*) dan penyaluran (*distribution*) sarana produksi peternakan, kegiatan usaha produksi (budi daya), penyimpanan dan pengolahan, serta penyaluran dan pemasaran produk peternakan yang didukung oleh lembaga penunjang seperti perbankan dan kebijakan pemerintah (*government policy*) (Rahardi dan Hartono, 2003).

Seperti halnya sub-sektor pertanian lainnya seperti tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, sub sektor peternakan juga mendapat porsi yang sama dari pemerintah untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Menurut Rahardi dan Hartono 2003, ada beberapa faktor yang memungkinkan berkembangnya sub sektor peternakan di Indonesia di antaranya : 1) Lahan, 2) Bibit, 3) Makanan Ternak, 4) Teknologi Bibit, 5) Vaksin dan obat-obatan, 6) Pasar.

Pembangunan peternakan di Indonesia berbasis peternakan rakyat, terutama berskala usaha kecil dan menengah. Ini terlihat dari jumlah rumah tangga peternak yang cukup banyak dan total produksinya dapat berperan dalam skala Nasional. Namun, kondisi peternakan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan untuk berkembang. Tantangan yang dihadapi tersebut antara lain keterbatasan modal, usaha belum mencapai skala ekonomis, dan masih bersifat tradisional. Selain itu, produktivitas ternak masih rendah, teknologi belum dilaksanakan secara terpadu, dan

adanya persaingan global terhadap produk-produk impor sejenis dari negara tetangga (Satyawibawa, 1993).

Lebih lanjut lebih lanjut dikemukakan bahwa, selain tantangan, peternakan juga memberikan peluang usaha yang cukup besar. Jumlah permintaan terhadap produk-produk peternakan terus mengalami peningkatan, terutama untuk pasar dalam negeri. Misalnya saja, kebutuhan susu segar dalam negeri berkisar satu juta ton pertahun. Peluang investasi di sektor peternakan memiliki prospek cerah. Sumber daya peternakan yang belum digali secara optimal dan peluang pasar yang masih terbuka lebar adalah dua hal pokok yang menjadi alasan pengembangan usaha di sektor peternakan.

Pajak dan Retribusi

Definisi dan pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo,2003 adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berasal dari bahasa asing yaitu *tax* yang berarti beban, membebani, dan membebankan. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Ada dua fungsi pajak, yaitu : 1) fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, 2) fungsi regulerend yaitu untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

adanya persaingan global terhadap produk-produk impor sejenis dari negara tetangga (Satyawibawa, 1993).

Lebih lanjut lebih lanjut dikemukakan bahwa, selain tantangan, peternakan juga memberikan peluang usaha yang cukup besar. Jumlah permintaan terhadap produk-produk peternakan terus mengalami peningkatan, terutama untuk pasar dalam negeri. Misalnya saja, kebutuhan susu segar dalam negeri berkisar satu juta ton pertahun. Peluang investasi di sektor peternakan memiliki prospek cerah. Sumber daya peternakan yang belum digali secara optimal dan peluang pasar yang masih terbuka lebar adalah dua hal pokok yang menjadi alasan pengembangan usaha di sektor peternakan.

Pajak dan Retribusi

Definisi dan pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo,2003 adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berasal dari bahasa asing yaitu *tax* yang berarti beban, membebani, dan membebankan. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Ada dua fungsi pajak, yaitu : 1) fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, 2) fungsi regulierend yaitu untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil

Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

d. pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutannya harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2003).

Pajak secara khusus dapat dikelompokkan berdasarkan sifat tertentu yang dimiliki oleh masing-masing pajak. Pengelompokan itu antara lain didasarkan lembaga pemungut, golongan, dan UU Tahun 2000. Berdasarkan lembaga pemungut pajak dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah, sedangkan berdasarkan golongannya

maka pajak dapat dikelompokkan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung (Irmawan, 2003).

Pajak hanya dapat dibenarkan pungutannya apabila bermanfaat bagi masyarakat. Jika pajak-pajak hanya digunakan untuk segolongan kecil dari masyarakat, atau dipungut dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penguasa (seperti di zaman kolonial), maka pungutan pajak tidak dapat dibenarkan (Soemitro, 1998).

Brotodihardjo, 1993 menyatakan bahwa, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah : a). Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, b). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah, c). Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, d). Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*, e). Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur

Retribusi didasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa, yaitu : barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, harus membayar. Cara pembayarannya ini bermacam-macam, kadang-kadang tidak dengan uang melainkan dengan materai, misalnya akta untuk berburu dan akta untuk menangkap ikan, bahkan ada yang dengan memakai cara seperti pemungutan pajak langsung (Brotodihardjo, 1993)

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha. Objek retribusi adalah jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi (Setiawan dan Suprati, 2002).

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, kartu langganan dan lain-lain (Waluyo dan Irawan, 2000).

Dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 jenis retribusi daerah disebutkan pada pasal 18. jenis Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum ; jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha ; jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu ; kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mugodim, 1999).

Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa pemotongan hewan di RPH (Rumah Pemotongan Hewan), jasa pemeriksaan hewan dan jasa pemeriksaan daging. Tarifnya Rp. 20.000 untuk setiap ekor hewan yang dipotong. Pembayaran retribusi ditanggung oleh perusahaan jagal dan disetor kepada petugas pungut Dinas Peternakan setelah proses pemotongan hewan selesai (Harun, 2003).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain usaha daerah yang sah. Pajak daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Harun, 2003).

Kaho (2001) menyatakan, sumber pendapatan daerah adalah :

(a) Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. lain-lain usaha daerah yang sah.

(b) Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- (c) Lain-lain pendapatan yang sah

Jadi pendapatan daerah dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu :

1. Pendapatan asli daerah
2. Pendapatan non asli daerah

Widjaya (1998) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan keberhasilan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- (a) Hasil pajak daerah
- (b) Hasil retribusi daerah
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Anonim, 1999).

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan September sampai dengan bulan Oktober 2004 di Kabupaten Bulukumba.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan tentang penerimaan pajak sub sektor peternakan dan kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba.

Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan yang terdapat pada kantor dinas pendapatan daerah. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan serta total pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Pengambilan selama lima tahun tersebut untuk melihat perkembangan kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba.

Jenis Data

- Data Primer yaitu data yang diperoleh dari Instansi Pemerintah yang terkait dengan penelitian ini. Data primer tersebut adalah Jumlah dan Jenis Pajak Ternak, Jenis dan Jumlah Retribusi, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Sumber Pendapatan Asli Daerah dan tanggapan pemerintah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian yang telah tersedia dan data kepustakaan lain yang mendukung materi penelitian meliputi keadaan umum wilayah penelitian.

Analisa Data

Analisa data yang digunakan untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba pada penelitian ini adalah sesuai dengan pendapat (Asri, 1991) sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bulukumba}} \times 100 \%$$

Konsep Operasional

- Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat dalam sub sektor peternakan yang dinyatakan dalam rupiah pertahun.
- Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan pada sub sektor peternakan yang dinyatakan dalam Rupiah pertahun.



- Kontribusi adalah besarnya persentase sumbangan pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba dalam satuan persen pertahun.
- Total pendapatan asli daerah adalah total penerimaan daerah Kabupaten Bulukumba dari sektor pajak dan retribusi daerah yang dinyatakan dalam rupiah pertahun.
- Penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, pengambilan dan pengolahan galian C, hasil produksi perkebunan, pajak pengolahan kapas dan pajak hewan.
- Penerimaan retribusi daerah yaitu antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pengangkutan hewan dan lain-lain.

KEADAAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Geografi Daerah

Kabupaten Bulukumba yang nama ibukotanya sama dengan nama kabupaten itu sendiri merupakan wilayah dibagian Selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari ibu kota propinsi Sulawesi Selatan terletak antara $05^{\circ}2' - 05^{\circ}40'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}58' - 120^{\circ}38'$.

Secara Administratif, batas-batas Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kaabupaten Sinjai.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bulukumba yaitu sekitar 1.154,67 km^2 atau sekitar 1,85 % dari keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 kecamatan dan terbagi atas 125 desa/kelurahan. Adapun luas daerah menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Dacrah Menurut Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2004.

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase (%)
010	Gantarang	173,51	15,03
020	Ujungbuhu	14,44	1,25
021	Ujung Loe	144,31	12,50
030	Bontobahari	108,60	9,40
040	Bontotiro	78,34	6,78
050	Herlang	68,79	5,96
060	Kajang	129,06	11,18
070	Bulukumpa	171,33	14,84
080	Rilau Ale	117,53	10,18
090	Kindang	148,76	12,88
Total		1.154,76	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2004

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pada hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bulukumba adalah 370.728 jiwa yang tersebar di sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba dengan komposisi dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah .

- Laki-laki sebanyak 175.076 jiwa
- Perempuan sebanyak 195.652 jiwa.

Berdasarkan pada data di atas, terlihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Bulukumba lebih didominasi oleh kaum perempuan dengan tingkat ratio jenis kelamin sebesar 89. Adapun komposisi dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Ada Di Kabupaten bulukumba Tahun 2003.

Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Ratio Jenis Kelamin)
010	Gantarang	32.479	34.479	67.037 (94)
020	Ujungbulu	19.676	21.470	41.146 (92)
021	Ujung Loe	17.002	19.029	36.031 (89)
030	Bontobahari	10.184	12.347	22.531 (82)
040	Bontotiro	10.946	13.169	24.115 (83)
050	Herlang	10.875	13.094	23.969 (83)
060	Kajang	21.277	23.534	44.811 (90)
070	Bulukumpa	22.857	24.947	47.804 (92)
080	Rilau Ale	16.075	18.038	34.113 (89)
090	Kindang	13.625	15.545	22.171 (88)
Total		175.076	195.652	370.728 (89)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2004

Dari Tabel 4, terlihat bahwa kecamatan yang menduduki peringkat teratas dalam jumlah penduduk adalah Kecamatan Gantarang, dengan jumlah laki-laki adalah 32.558 jiwa dan perempuan dengan jumlah 343.479 jiwa. Dengan ratio jenis kelamin adalah 89. sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bontobahari dengan jumlah laki-laki sebanyak 10.184 jiwa dan perempuan dengan jumlah 12.347 jiwa dengan ratio jenis kelamin adalah 82.

C. Keadaan Sosial

Proses interaksi sosial tak pernah lepas dari aktifitas keseharian penduduk Kabupaten Bulukumba. Dengan interaksi sosial antara sesama, maka kehidupan akan terasa tenteram dan damai. Proses interaksi tak pernah pula luput dari bagaimana keadaan sosial penduduk itu sendiri. Berbagai macam keadaan sosial menjadi pembentuk karakter kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba, keadaan sosial tersebut antara lain pada bidang :

C.1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumberdaya manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan sosial dan ekonomi, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

Dari tahun ketahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih memberikan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi penduduk untuk memperoleh ilmu pengetahuan di bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang layak dan memadai.

Dalam menunjang program tersebut, sejumlah sarana dalam bidang pendidikan didirikan dengan harapan masyarakat dapat termotifasi dalam belajar. Jumlah dari sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Sarana Pendidikan Yang Terdapat Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2004.

Kode Wilayah	Kecamatan	Sekolah	Ruang Kelas	Guru		Murid
				PNS	GTT	
010	Gantarang	20	38	15	50	846
020	Ujungbulu	21	48	25	63	1.078
021	Ujung Loe	6	15	4	13	332
030	Bontobahari	5	11	6	9	242
040	Bontotiro	22	44	26	33	691
050	Herlang	12	24	13	31	542
060	Kajang	3	5	3	4	95
070	Bulukumpa	6	14	7	17	254
080	Rilau Ale	10	20	6	23	366
090	Kindang	5	10	-	17	186
Total		110	229	105	260	4.632

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2004

Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Bulukumba cukup tersebar rata di masing-masing kecamatan, dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 110 sekolah, juga dalam hal jumlah guru yang relatif sebanding dengan jumlah murid keseluruhannya.

C.2. Kesehatan

Di Kabupaten Bulukumba terdapat 1 buah rumah sakit umum pemerintah tipe C. pada tahun 2003, sarana kesehatan lainnya yang dibangun adalah Puskesmas, sehingga menjadikan peningkatan sebanyak 69 buah dari total 64 buah pada tahun 2000. dari jumlah tersebut terdiri dari 9 buah Puskesmas Inpres, 7 buah Puskesmas non Inpres serta 53 buah Puskesmas Pembantu (Pustu). Sarana kesehatan ini dikelola oleh kurang lebih 492 tenaga medis yang terdiri dari 30 orang dokter umum, 5 orang dokter gigi, 4 orang dokter ahli, 2 orang

apoteker, 16 orang sarjana kesehatan, 201 orang paramedik perawat, 63 bidan, 141 paramedik non perawat dan 30 orang tenaga kesehatan lainnya.

C.3. Agama

Perekembangan pembanguinan dibidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Pada daerah Kabupaten Bulukumba terdapat sarana peribadatan berupa 571 buah mesjid, 17 buah langgar dan 203 mushallah, sedangkan sarana peribadatan lainnya adalah 1 buah gereja.

Penduduk Kabupaten Bulukumba secara umum adalah pemeluk agama Islam yaitu sebesar 99,88 %, sebanyak 0,08 % adalah pemeluk agama Kristen Protestan, sebanyak 0,01 % Kristen Katolik, 0,01 % pemeluk agama Hindu dan selebihnya adalah pemeluk agama lainnya.

D. Perkembangan Sektor Pertanian

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah di wilayah selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan andalan, yang mampu memberikan kontribusi dalam memperkokoh Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan juga terdapat sub-sektor lainnya yang dapat menjadi andalan Kabupaten Bulukumba antara lain adalah pada sektor tanaman perkebunan, sub-sektor peternakan dan sub-sektor bahari (perikanan dan kelautan).

E. Perkembangan Sub-Sektor Peternakan

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang berpotensi di bidang usaha sub-sektor peternakan. Gambaran ini dapat terlihat dari besarnya populasi ternak yang dipelihara di daerah ini. Pada tahun 2003 populasi ternak besar berupa sapi

sebanyak 85.835 ekor, kerbau sebanyak 5.493 ekor dan kuda sebanyak 25.063 ekor. Ternak kecil berupa kambing dengan populasi sebanyak 28.006 ekor.

Selain ternak besar, komoditas ternak unggas juga menjadi andalan bagi perkembangan usaha sub-sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba. Ternak unggas yang berpotensi di daerah ini berupa ternak ayam ras sebanyak 242.802 ekor, ternak ayam buras sebanyak 714.852 ekor, dan ternak itik sebanyak 60.051 ekor. Hasil ternak yang diusahakan tersebut sebagian besar untuk dikonsumsi masyarakat sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang dikirim ke daerah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, selain itu juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya.

Seperti daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba juga menggantungkan pendapatan asli daerahnya pada sektor-sektor yang dapat menjadi keunggulan dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan-peraturan daerah mengenai penarikan pajak dan retribusi daerah. Dalam mewujudkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba memperhitungkan target dari Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya merealisasikannya dalam total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya. Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003

No	Uraian	1999		2000		2001		2002		2003		Rata-rata %
		Target (Rp)	%	Target (Rp)	%	Target (Rp)	%	Target (Rp)	%	Target (Rp)	%	
1	Pajak Daerah											
	a. Sub sektor Peternakan	0	0	0	0	0	0	26.028.000	0,02	35.200.000	0,02	0,004
	b. Sektor lain	1.189.984.596	11,7	1.198.530.080	2,02	2.101.517.400	1,54	3.677.392.200	2,68	2.878.045.685	1,64	3,92
2	Retribusi Daerah											
	a. Sub sektor Peternakan	15.440.000	0,15	18.780.000	0,03	476.170.000	0,35	30.240.000	0,02	491.200.000	0,22	0,15
	b. Sektor lain	2.862.599.500	28,3	2.499.110.000	4,25	4.087.796.412	2,98	5.298.573.860	3,01	6.923.421.790	3,12	8,32
3	Bagian Laba Usaha Daerah	77.014.152	0,76	73.908.500	0,13	73.908.500	0,05	73.908.500	0,04	115.875.000	0,05	0,21
4	Lain2 Pendapatan											
	Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah/Instansi & Lain-lain	1.978.974.650	19,5	307.211.713	0,52	1.222.716.400	0,89	1582347.650	0,89	2.290.088.043	1,03	4,57
5		4.020827.900	39,6	54.699.053.122	93,0	128.849.536.300	94,2	165.351.711.128	93,9	209.482.305.386	94,3	83,01
		10.144.840.798	100	58.796.593.415	100	1.368.00	100	136.877.645.012	100	176.016.776.138	100	100,0

Sumber : Data Primer Hasil Olahan, 2004.

Pada Tabel 4. terlihat bahwa target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir yaitu terbesar berada pada sektor pendapatan yang berasal dari pemerintah/instansi dan lain-lain berkisar antara 39,6 % sampai dengan 94,3 %. Sedangkan target terkecil yaitu pada sub sektor peternakan yang berkisar antara 0,02 % sampai dengan 0,35 %. Dengan melihat kenyataan pada Tabel 4, maka dapat dikatakan bahwa target sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba yang paling dominan adalah sektor pendapatan yang berasal dari pemerintah/instansi dan lain-lain.

Sementara besarnya realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003.

No	Uraian	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata (%)
		Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)	
1	Pajak Daerah	-	-	-	87,56	76,92	82,24
	a. Sub sektor Peternakan						
	b. Sektor lain	57,31	51,89	67,07	82,13	71,15	65,91
2	Retribusi Daerah						
	a. Sub sektor Peternakan	59,47	90,52	100,24	87,10	93,30	86,13
	b. Sektor lain	68,49	78,08	90,09	82,33	79,36	79,67
3	Bagian Laba Usaha Daerah	100,00	100,00	91,29	156,78	119,84	113,58
4	Lain-lain Pendapatan	23,70	92,08	92,40	119,47	191,12	103,75
5	Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah/Instansi & Lain-lain	114,34	92,86	81,54	98,54	98,26	97,11
Total Realisasi		76,83	91,41	81,74	97,92	98,27	89,23

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2004.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk setiap pos penerimaan menunjukkan sebagian besar pos penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba masih berada dibawah target. Hal ini dapat dilihat dari nilai persentase realisasi yang berada di bawah 100 %, kecuali pada beberapa pos penerimaan seperti bagian laba usaha daerah yang berasal dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Lain-lain pendapatan. Hal ini disebabkan karena kinerja karyawan penarik pajak pada sektor tersebut cukup tinggi, serta usaha tersebut merupakan usaha yang langsung ditangani oleh pemerintah sehingga penarikan pajaknya lebih mudah. Pada Tabel 5, terlihat pula bahwa persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terkecil yaitu pada pos pajak lain-lain daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, reklame dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan untuk pajak dari sub sektor peternakan hanya terdapat pada tahun 2002 dan 2003.

Sementara itu, realisasi terbesar sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba berasal dari pendapatan yang berasal dari pemerintah/instansi dan lain-lain yang antara lain terdiri dari bagi hasil pajak : Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB), pajak penghasilan; Bagi hasil bukan pajak : iuran hasil hutan, pembayaran hak atas tanah negara dan penerimaan dari iuran eksploitasi/royalti; dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan tersebut merupakan sumber

penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sub sektor peternakan dengan sektor lainnya, menunjukkan bahwa realisasi sub sektor peternakan sudah cukup baik hal ini nampak dari nilai pencapaiannya target yang pernah mecapai lebih dari 100 % dengan rata-rata 86,13 %. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba sub sektor peternakan sudah berada diatas 50 % sejak tahun 1999.

Tinggi rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah ini dipengaruhi pada beberapa faktor baik itu berasal dari kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba ataupun dari peran aktif masyarakat Kabupaten Bulukumba sebagai wajib pajak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya, maka hal ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber penarikan pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba, terbagi dalam beberapa pos penarikan pajak dan retribusi daerah yaitu :

L. Pajak Daerah

Pajak secara khusus dapat dikelompokkan berdasarkan sifat tertentu yang dimiliki oleh masing-masing pajak. Pengelompokan itu antara lain didasarkan

lembaga pemungut, golongan, dan UU Tahun 2000. Berdasarkan lembaga pemungut pajak dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah, sedangkan berdasarkan golongannya maka pajak dapat dikelompokkan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Khusus mengenai pajak daerah, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini sebagai pelaksana dari pemungutan pajak daerah tersebut adalah pajak hanya dapat dibenarkan pungutannya apabila bermanfaat bagi masyarakat. Jika pajak-pajak hanya digunakan untuk golongan kecil dari masyarakat, atau dipungut dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja, maka pungutan pajak tidak dapat dibenarkan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam menerapkan penerikan pajak daerah kepada penduduknya, terlebih dahulu menetapkan pos-pos pajak yang dapat dikenakan pajak daerah. Pembagian pos-pos ini berkaitan dengan upaya menertibkan dan pengontrolan terhadap objek pajak. Adapun jenis dan pos-pos dari pajak daerah yang dikenakan di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

a. Pajak hotel dan penginapan, yang berasal dari :

- Rumah makan
- Penginapan umum
- Penginapan khusus BIRA

b. Pajak hiburan

c. Pajak reklame

- Reklame tetap
- Pemasangan insidental

- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol. C
- f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah.

II. Retribusi Daerah

Pos yang merupakan sumber lain dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba adalah retribusi daerah. Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.

Sumber-sumber yang merupakan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bulukumba antara lain :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi terminal
- c. Retribusi izin mendirikan bangunan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin gangguan.

Dengan adanya pemasukan ke kas daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, maka selain melancarkan dalam hal pembangunan daerah juga menjadi parameter dari tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Hal ini dikarenakan bahwa dengan kesadaran yang tinggi masyarakat sebagai wajib pajak dalam melunasi kewajiban mereka maka akan mempercepat perealisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba, yang secara otomatis akan

diimplementasikan dalam bentuk pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan

Sub-sektor peternakan merupakan salah satu bagian yang dipandang penting dan memiliki potensi yang besar bagi pembangunan Kabupaten Bulukumba. Hal ini dapat dilihat dengan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah dalam hal pembangunan sub-sektor peternakan.

Dengan adanya keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam pembangunan sub-sektor peternakan, maka diharapkan pula mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan daerah dalam hal ini adalah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Untuk mencapai apa yang dapat diberikan oleh sub-sektor peternakan yang ada, maka merupakan tugas dan usaha dari pemerintah setempat. Penggalian potensi ini tidak semata ditujukan pada pembangunan sarana dan prasarana, melainkan juga dapat digali melalui sumbangsih berupa pajak dan penarikan retribusi sub-sektor peternakan.

Kegiatan yang berkaitan langsung dengan sub-sektor peternakan dapat saja menjadi peluang dalam memenuhi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Setiap tahunnya, pajak dan retribusi yang bersumber dari sub-sektor peternakan dimasukkan dalam laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Pajak dan retribusi sub-sektor peternakan yang ditarik bersumber pada retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di

Kabupaten Bulukumba. Adapun target dan realisasi dari pajak dan penarikan retribusi sub-sektor peternakan selama 5 tahun pada daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak dan Penarikan Retribusi Sub-sektor Peternakan Pada Daerah Kabupaten Bulukumba Selama Tahun 1999 Sampai Dengan 2003.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1999	15.440.000,00	9.182.000,00	59,47
2000	18.780.000,00	16.999.000,00	90,52
2001	476.170.000,00	477.321.700,00	100,24
2002	30.240.000,00	26.340.000,00	87,10
2003	491.200.000,00	458.313.000,00	93,30
Total	1.031.830.000,00	988.155.700,00	430,63
Rata-rata	206.366.000,00	197.631.140,00	86,13

Sumber : Data Primer Setelah Di Olah, 2004

Dari Tabel 6, terlihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi target dari pajak dan retribusi sub-sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 1999 realisasi penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan sebesar 59,47 %, merupakan persentase realisasi terendah selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2001 realisasi penerimaan pajak dan retribusi mencapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,24 % atau 0,24 % lebih tinggi dari target. Hal ini tentunya tidak lepas dari usaha dan kesiapan pemerintah dalam melakukan penarikan atau pemungutan pajak dan retribusi tersebut serta kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi, dan mengurangi tindakan pemotongan liar. Rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak dan retribusi sub

sektor peternakan sebesar 86,13 %, yang berarti bahwa penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan masih berada dibawah target. Besar kecilnya penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan sangat dipengaruhi oleh populasi ternak yang terdapat di daerah tersebut.

Pada Tabel 5. terlihat pula bahwa pada tahun 2001 dan 2003 target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan tertinggi selama lima tahun terakhir. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi sub sektor peternakan oleh pihak pemerintah tentunya dengan melihat kemampuan dan kondisi perkembangan sub sektor peternakan yang ada, selain itu pada tahun tersebut dilaksanakan pengkartuan, pengecapan ternak dan penarikan retribusi pengangkutan ternak ke luar daerah.

Pajak hewan ternak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bulukumba. Dengan semakin besarnya populasi ternak tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Setiap jenis hewan ternak memiliki nilai pajak yang berbeda. Adapun besarnya pajak hewan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Besarnya Pajak Kepemilikan Hewan Ternak di Kabupaten Bulukumba.

No	Jenis Hewan	Pajak (Rp/Ekor)
1.	Kuda	2.500
2.	Kerbau	5.000
3.	Sapi	3.000
4.	Kambing	1.000

Sumber : Data Sekunder Dinas Peternakan Kabupaten Bulukumba, 2003

Pada Tabel 7. terlihat bahwa besarnya pajak untuk masing-masing jenis hewan ternak berbeda-beda. Adapun pajak terbesar yaitu pada ternak kerbau yaitu sebesar Rp. 5.000,- pertahun pajak. Sedangkan paling kecil yaitu pada ternak kambing sebesar Rp. 1.000,- Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah Kabupaten Bulukumba tentang penarikan pajak hewan ternak.

Selain pajak hewan ternak, penerimaan asli daerah Kabupaten Bulukumba juga bersumber pada retribusi rumah potong hewan (RPH). Retribusi rumah potong hewan (RPH) merupakan salah satu sumber penerimaan sub sektor peternakan terbesar yang diperoleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Adapun aturan besarnya retribusi pemotongan untuk masing-masing hewan ternak dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Besarnya Retribusi Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Bulukumba.

No	Jenis Hewan	Retribusi (Rp/Ekor)
1.	Kuda	10.000
2.	Kerbau	25.000
3.	Sapi	20.000
4.	Kambing	5.000

Sumber : Data Sekunder Dinas Peternakan Kabupaten Bulukumba, 2003

Pada Tabel 8. terlihat bahwa besarnya retribusi pemotongan hewan ternak di Kabupaten Bulukumba bervariasi berdasarkan jenis ternak. Adapun biaya retribusi ternak terbesar yaitu pada ternak kerbau sebesar Rp. 25.000,- per ekor sedangkan retribusi pemotongan terkecil yaitu sebesar Rp. 5.000,-. Melihat hal tersebut maka penerimaan daerah akan semakin meningkat. Namun kenyataannya, seringkali terjadi

pemotongan ternak yang tidak melalui Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga biaya retribusi pemotongan hewan tersebut tidak masuk ke dalam kas daerah.

Sementara sumber-sumber penerimaan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sumber Penerimaan Retribusi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Bulukumba.

No	Sumber Retribusi	1999	2000	2001	2002	2003
1.	RPH (Rp)	15.440.000	18.780.000	25.920.000	30.240.000	32.850.000
2.	Pengangkutan (Rp)	0	0	22.750.000	0	0
3.	Pengkartuan (Rp)	0	0	427.500.000	0	420.000.000

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2004.

Pada Tabel 9. terlihat bahwa sumber-sumber penerimaan retribusi sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 yaitu retribusi rumah potong hewan, pengangkutan ternak/hewan keluar daerah dan pengkartuan hewan. Retribusi rumah potong hewan merupakan salah satu sumber penerimaan retribusi yang setiap tahunnya memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba, sedangkan untuk retribusi pengangkutan dan pengkartuan hewan hanya dilakukan pada tahun 2001 dan 2003.

Setelah melihat sumber-sumber penerimaan pajak sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi peternakan yang masih belum mencapai target yang diharapkan. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi pemungutan pajak adalah faktor kesadaran para wajib pajak dan kinerja para pemungut pajak.

Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya realisasi target yang ingin dicapai pada penarikan pajak dan retribusi sub-sektor peternakan, maka yang ingin kemudian diketahui adalah seberapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Dari hasil perhitungan dengan formulasi rumus kontribusi, maka diperoleh hasil kontribusi sub-sektor peternakan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba yang dinyatakan dalam persentase (%), seperti yang disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Kontribusi Sub-Sektor Peternakan Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba.

No	Tahun	Total PAD (Rp)	Total Retribusi dan Pajak Ternak (Rp)	Persentase (%)
1	1999	8.794.398.442,88	9.182.000,00	0,05
2	2000	53.726.500619,19	16.999.000,00	0,02
3	2001	111.830.017.105,44	477.321.700,00	0,003
4	2002	172.362.926.736,85	26.340.000,00	0,007
5	2003	218.378.300.204,26	458.313.000,00	0,002
Total		565.092.4143.108,62	988.155.700,00	0,08
Rata-rata		113.018.428.621,72	197.631.140,00	0,02

Sumber : Data Primer Setelah Di Olah, 2004

Dari Tabel 10. terlihat bahwa persentase yang diberikan oleh sub-sektor peternakan terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba semakin meningkat, walaupun masih berkisar dibawah 1,00 %, akan tetapi jika hal

ini terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan keluasaan gerak terhadap sub-sektor peternakan untuk berkembang, maka ditahun mendatang akan terbuka banyak pos-pos penarikan retribusi dan pajak ternak, yang akan menunjang dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba yang optimal. Adapun rata-rata kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan yaitu sebesar 0,02 %.

Jika dibandingkan dengan sektor lain, sub sektor peternakan masih memberikan kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan karena sub sektor peternakan bukan merupakan sektor andalan utama dalam penerimaan pajak dan retribusi. Hal ini dapat dilihat dari target yang dibebankan kepada sub sektor peternakan yang masih cukup rendah bila dibandingkan dengan sektor lain seperti pada sektor hiburan dan pariwisata, kesehatan dan lain-lain yang mencapai ratusan juta yang jika dibandingkan dengan sub sektor peternakan yang rata-rata realisasi hanya sebesar Rp. 197.631.140,00.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 0,02 % dari total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi sub sektor peternakan terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba masih rendah.

Saran

Pentingnya peningkatan kinerja pemungutan pajak sebagai upaya pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba, serta peningkatan kesadaran para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999. Penjelasan Atas Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Biro Bina Otonomi Daerah bagian Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- _____. 2003. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Makassar.
- _____. 2004. Bulukumba Dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Makassar.
- Brotodihardjo, S. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT. Eresco, Bandung.
- Harun, H. 2003. Menetapkan Program Sosialisasi Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Edisi I, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Irmawan. 2003. Sistem Perpajakan. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kaho, Y.R. 2001. Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol Universitas Gadjah Mada. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Madasmu. 2003. Perpajakan. Penerbit Andi. Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Mugodim. 1999. Pengantar Perpajakan. RadjaGrafindo, Jakarta.
- Rahardi, F dan Hartono, R. 2003. Agribisnis Peternakan. Seri Agribisnis, Edisi Revisi, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rasyaf, M. 1995. Pedoman Beternak Ayam Pedaging. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satyawibawa, B. 1993. Perpajakan di Indonesia. PT. Grafika, Jakarta.
- Setiawan, S dan Suprpti, E. 2002. Perpajakan. Bayu Media dan Universitas Negeri Malang Press, Malang.
- Soemitro, R. 1998. Azas dan Dasar Perpajakan 1. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. Perpajakan Indonesia. Seri Perpajakan Lengkap. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Widjaya, A.W. 1998. Titik Berat Otonomi Pada daerah Tingkat II. PT. Rajafindo Persada, Jakarta.

Lampiran 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan Tahun 2003.

No	Uraian	1999		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah			
	a. Pajak Hotel dan Restoran	29.353.920,00	28.028.831,00	95,49
	b. Pajak Hiburan	10.000.000,00	6.825.200,00	68,25
	c. Pajak Reklame	12.500.000,00	10.766.018,00	86,13
	d. Penerangan Jalan	556.744.010,00	469.126.940,00	84,26
	e. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	448.690.700,00	156.543.489,60	34,89
	f. Pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan	72.690.966,00	10.632.975,00	14,63
	g. Pajak kendaraan tanpa motor	0,00	0,00	0,00
	h. Pajak Hasil Produksi Perkebunan	0,00	0,00	0,00
	i. Pajak pengolahan kapas	0,00	0,00	0,00
	j. Pajak Hasil Bumi, ternak, perairan	0,00	0,00	0,00
2	Pos Retribusi Daerah			
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.250.000.000,00	653.374.190,00	10,45
	b. Persampahan/Kebersihan	106.344.000,00	75.830.000,00	71,31
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Cacatan Sipil	633.673.000,00	78.692.741,00	12,42
	d. Pelayanan Pemakaman	1.500.000,00	1.785.000,00	119,00
	e. Parkir pinggir jalan utama	10.000.000,00	3.650.200,00	36,50
	f. Retribusi pasar	568.562.000,00	518.078.550,00	91,12
	g. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	80.000.000,00	20.437.000,00	25,55
	h. Retribusi pasar grosir	0,00	0,00	0,00
	i. Retribusi Terminal	160.000.000,00	162.274.300,00	101,42
	j. Retribusi tempat khusus/parkir kendaraan	134.700.000,00	126.552.200,00	93,95
	k. Retribusi rumah potong hewan	15.440.000,00	9.182.000,00	59,47
	l. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	60.000.000,00	53.936.274,00	89,89
	m. Retribusi Izin mendirikan bangunan	400.000.000,00	199.572.799,91	49,89
	n. Retribusi Izin Gangguan/HO	0,00	0,00	0,00
	o. Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
	p. Uang leges	0,00	0,00	0,00
	q. Retribusi pangkalan hasil bumi	0,00	0,00	0,00
	r. Izin pengoperasian perusahaan	0,00	0,00	0,00
	s. Bongkahan barang	0,00	0,00	0,00
	t. Pengangkutan hewan keluar daerah	0,00	0,00	0,00
	u. Ret. Pemakaian jalan daerah	0,00	0,00	0,00
	v. Ret. Kesehatan calon mempelai	0,00	0,00	0,00
	w. Izin penggunaan jalan	0,00	0,00	0,00
	x. Ret. Pengkartuan hewan	0,00	0,00	0,00
	y. Ret. Produksi Kapas	0,00	0,00	0,00

	aa. Ret Iuran pengairan	0,00	0,00	0,00
	ab. Ret Izin Pemanfaatan Kayu hutan	0,00	0,00	0,00
	ac. Penerimaan dari dinas	0,00	0,00	0,00
	ad. Penerimaan dari Kantor informasi dan komunikasi (TV Kabel)	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Laba Usaha			
	a. Bank Pembangunan Daerah	77.014.152,00	77.014.152,12	100,00
4	Lain-lain Pendapatan			
	a. Pendapatan Jasa Giro	47.000.000,00	46.586.237,00	99,12
	b. Sumbangan pihak ke III	10.000.000,00	3.000.000,00	30,00
	c. Angsuran cicilan kend. Bermotor	39.000.000,00	32.052.000,00	82,18
	d. Hasil penjualan barang milik daerah	970.000.000,00	230.000.000,00	23,71
	e. Lain-lain pendapatan	912.974.650,00	157.324.139,50	17,23
	f. Penerimaan pengembalian pinjaman kredit permodalan	0,00	0,00	0,00
5	Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi			
	Bagi Hasil Pajak			
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	3.107.355.000,00	3.687.780.628,00	118,68
	b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	840.972.900,00	839.225.842,75	99,79
	c. Bagian dri Kendaraan Bermotor (PKB) dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor	0,00	0,00	0,00
	d. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
	e. Pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan (PPH. 21)	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a. Iuran Hasil Hutan	30.000.000,00	26.734.593,00	89,12
	b. Pemb. Hak Atas Tanah Negara	2.500.000,00	1.724.010,00	68,96
	c. Penerimaan dari iuran eksploitasi/royalti	40.000.000,00	41.111.828,00	102,78
	Dana Rutin Daerah			
	Bantuan			
	- Bantuan pembangunan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Lainnya			
	a. Bantuan/Sumbangan Kepala Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman			
	Pinjaman Kredit	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum			
	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus			
	Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00
	Dana peningkatan jalan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.627.015.298,00	7.727.842.138,88	49,45

Tahun 2000

No	Uraian	2000		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah			
	a. Pajak Hotel dan Restoran	103.731.420,00	38.178.277,00	36,80
	b. Pajak Hiburan	10.762.000,00	11.675.300,00	108,49
	c. Pajak Reklame	15.740.000,00	9.016.300,00	57,28
	d. Penerangan Jalan	429.265.000,00	373.264.585,00	86,95
	e. Pengambilan dan Pengolahn Bahan Galian C	580.454.160,00	177.992.291,24	30,66
	f. Pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan	58.577.500,00	11.846.580,00	20,22
	g. Pajak kendaraan tanpa motor	0,00	0,00	0,00
	h. Pajak Hasil Produksi Perkebunan	0,00	0,00	0,00
	i. Pajak pengolahan kapas	0,00	0,00	0,00
	j. Pajak Hasil Bumi, ternak, perairan	0,00	0,00	0,00
2	Pos Retribusi Daerah			
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	937.771.900,00	740.272.726,00	78,94
	b. Persampahan/Kebersihan	85.000.000,00	70.409.500,00	82,83
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00
	d. Pelayanan Pemakaman	1.215.000,00	1.352.500,00	111,32
	e. Parkir pinggir jalan utama	12.500.000,00	3.693.000,00	29,54
	f. Retribusi pasar	450.000.000,00	394.378.700,00	87,64
	g. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	101.191.000,00	92.090.000,00	91,01
	h. Retribusi pasar grosir	22.500.000,00	2.535.000,00	11,27
	i. Retribusi Terminal	163.800.000,00	127.069.300,00	77,58
	j. Retribusi tempat khusus/parkir kendaraan	119.812.500,00	111.090.000,00	92,72
	k. Retribusi rumah potong hewan	18.780.000,00	16.999.000,00	90,52
	l. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	41.725.000,00	47.467.000,00	113,76
	m. Retribusi Izin mendirikan bangunan	457.512.271,00	294.450.738,00	64,36
	n. Retribusi Izin Gangguan/HO	64.820.000,00	30.907.200,00	47,68
	o. Retribusi Izin Trayek	22.500.000,00	21.025.000,00	93,44
	p. Uang leges	0,00	0,00	0,00
	q. Retribusi pangkalan hasil bumi	0,00	0,00	0,00
	r. Izin pengoperasian perusahaan	0,00	0,00	0,00
	s. Bongkahan barang	0,00	0,00	0,00
	t. Pengangkutan hewan keluar daerah	0,00	0,00	0,00
	u. Ret. Pemakaian jalan daerah	0,00	0,00	0,00
	v. Ret. Kesehatan calon mepelai	0,00	0,00	0,00
	w. Izin penggunaan jalan	0,00	0,00	0,00
	x. Ret. Pengkartuan hewan	0,00	0,00	0,00
	y. Ret. Produksi Kapas	0,00	0,00	0,00
	aa. Ret Iuran pengairan	0,00	0,00	0,00
	Ab. Ret Izin Pemanfaatan Kayu hutan	0,00	0,00	0,00
	ac. Penerimaan dari dinas	0,00	0,00	0,00

	Ad. Penerimaan dari Kantor informasi dan komunikasi (TV Kabel)			
3	Bagian Laba Usaha	0,00	0,00	0,00
	a. Bank Pembangunan Daerah			
4	Lain-lain Pendapatan	73.908.500,00	73.908.567,53	100,00
	a. Pendapatan Jasa Giro	75.000.000,00	93.915.998,00	125,22
	b. Sumbangan pihak ke III	4.000.000,00	8.385.000,00	209,63
	c. Angsuran cicilan kend. Bermotor	10.000.000,00	1.440.000,00	14,40
	d. Hasil penjualan barang milik daerah	0,00	0,00	0,00
	e. Lain-lain pendapatan	2.182.117.130,00	179.142.188,00	8,21
	f. Penerimaan pengembalian pinjaman kredit permodalan	0,00	0,00	0,00
5	Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi	4.965.014.000,00	5.217.432.196,00	105,08
	Bagi Hasil Pajak			
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	3.149.514.000,00	4.011.918.450,00	127,38
	b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.742.500.000,00	1.122.867.537,42	64,44
	c. Bagian dri Kendaraan Bermotor (PKB) dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor	0,00	0,00	0,00
	d. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
	e. Pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan (PPh. 21)	0,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a. Iuran Hasil Hutan	30.000.000,00	29.076.720,00	96,92
	b. Pemb. Hak Atas Tanah Negara	3.000.000,00	424.622,00	14,15
	c. Penerimaan dari iuran eksploitasi/royalti	40.000.000,00	53.144.867,00	132,86
	Dana Rutin Daerah	36.055.114.182,00	35.042.678.916,00	97,19
	Bantuan			
	Bantuan pembangunan kabupaten	13.405.797.000,00	10.279.296.200,00	76,68
	Penerimaan Lainnya			
	a. Bantuan/Sumbangan Kepala Desa/ Kelurahan	169.531.540,00	159.925.256,00	94,33
	Pinjaman			
	Pinjaman Kredit	103.596.400,00	97.663.600,00	94,27
	Dana Alokasi Umum			
	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus			
	Dana Reboisasi	0,00	0,00	0,00
	Dana peningkatan jalan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	65.706.750.503,00	58.946.933.115,19	89,71

Tahun 2001

No	Uraian	2001		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah			
	a. Pajak Hotel dan Restoran	91.346.900,00	83.477.825,00	91,39
	b. Pajak Hiburan	8.000.000,00	3.935.000,00	49,19
	c. Pajak Reklame	16.500.000,00	18.082.000,00	109,59
	d. Penerangan Jalan	583.670.500,00	667.251.555,00	114,32
	e. Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C	324.000.000,00	218.001.099,00	67,28
	f. Pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan	0,00	0,00	0,00
	g. Pajak kendaraan tanpa motor	5.000.000,00	3.778.500,00	75,57
	h. Pajak Hasil Produksi Perkebunan	1.056.000.000,00	400.000.000,00	37,88
	i. Pajak pengolahan kapas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	j. Pajak Hasil Bumi, ternak, perairan	0,00	0,00	0,00
2	Pos Retribusi Daerah			
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.430.658.012,00	1.263.234.135,00	88,30
	b. Persampahan/Kebersihan	93.894.000,00	85.211.500,00	90,75
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	136.900.000,00	129.578.400,00	94,65
	d. Pelayanan Pemakaman	1.500.000,00	1.612.500,00	107,50
	e. Parkir pinggir jalan utama	12.500.000,00	6.869.000,00	54,95
	f. Retribusi pasar	683.445.500,00	691.999.400,00	101,25
	g. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	160.150.780,00	80.869.000,00	50,50
	h. Retribusi pasar grosir	22.500.000,00	15.943.540,00	70,86
	i. Retribusi Terminal	187.000.000,00	198.094.500,00	105,93
	j. Retribusi tempat khusus/parkir kendaraan	183.762.000,00	183.732.500,00	99,98
	k. Retribusi rumah potong hewan	25.920.000,00	23.832.000,00	91,94
	l. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	96.000.000,00	69.046.000,00	71,92
	m. Retribusi Izin mendirikan bangunan	466.885.550,00	302.419.291,00	64,77
	n. Retribusi Izin Gangguan/HO	100.000.000,00	75.850.400,00	75,85
	o. Retribusi Izin Trayek	30.000.000,00	30.050.000,00	100,17
	p. Uang leges	87.955.650,00	84.657.750,00	96,25
	q. Retribusi pangkalan hasil bumi	227.845.000,00	236.620.000,00	103,85
	r. Izin pengoperasian perusahaan	10.000.000,00	9.468.000,00	94,68
	s. Bongkahan barang	10.000.000,00	10.875.000,00	108,75
	t. Pengangkutan hewan keluar daerah	22.750.000,00	24.449.700,00	107,47
	u. Ret. Pemakaian jalan daerah	59.500.000,00	37.600.000,00	63,19
	v. Ret. Kesehatan calon mempelai	12.500.000,00	13.850.000,00	110,80
	w. Izin penggunaan jalan	800.000,00	830.000,00	103,75
	x. Ret. Pengkartuan hewan	427.500.000,00	429.040.000,00	100,36
	y. Ret. Produksi Kapas	24.000.000,00	19.109.540,80	79,62
	aa. Ret Iuran pengairan	0,00	0,00	0,00
	ab. Ret Izin Pemanfaatan Kayu hutan	0,00	0,00	0,00
	ac. Penerimaan dari dinas	0,00	0,00	0,00

	ad. Penerimaan dari Kantor informasi dan komunikasi (TV Kabel)			
3	Bagian Laba Usaha	0,00	0,00	0,00
	a. Bank Pembangunan Daerah			
4	Lain-lain Pendapatan	73.908.500,00	67.469.251,88	91,29
	a. Pendapatan Jasa Giro			
	b. Sumbangan pihak ke III	423.599.000,00	668.221.743,65	157,75
	c. Angsuran cicilan kend. Bermotor	146.000.000,00	88.723.500,00	60,77
	d. Hasil penjualan barang milik daerah	8.210.000,00	10.000.000,00	121,80
	e. Lain-lain pendapatan	240.000.000,00	111.250.000,00	46,35
	f. Penerimaan pengembalian pinjaman kredit permodalan	379.407.400,00	251.532.664,65	66,30
	Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi	0,00	0,00	0,00
5	Bagi Hasil Pajak	9.234.875.300,00	8.716.289.318,98	94,38
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	5.771.858.300,00	5.905.414.254,00	102,31
	b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.993.575.000,00	1.818.805.627,98	91,23
	c. Bagian dri Kendaraan Bermotor (PKB) dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor	0,00	0,00	0,00
	d. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	689.442.000,00	282.286.431,00	40,94
	e. Pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan (PPh. 21)	708.000.000,00	704.645.820,00	99,53
	Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a. Iuran Hasil Hutan	30.000.000,00	3.978.456,00	13,26
	b. Pemb. Hak Atas Tanah Negara	2.000.000,00	1.158.720,00	57,94
	c. Penerimaan dari iuran eksploitasi/royalti	40.000.000,00	0,00	0,00
	Dana Rutin Daerah	0,00	0,00	0,00
	Bantuan	0,00	0,00	0,00
	Bantuan pembangunan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	a. Bantuan/Sumbangan Kepala Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Kredit	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum			
	Dana Alokasi Umum	119.273.689.000,00	96.006.006.050,00	80,49
	Dana Alokasi Khusus			
	Dana Reboisasi	340.972.000,00	340.972.000,00	100,00
	Dana peningkatan jalan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	145.969.020.392,00	120.411.121.973,94	82,49

Tahun 2002

No	Uraian	2002		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah			
	a. Pajak Hotel dan Restoran	133.967.000,00	89.496.177,00	66,80
	b. Pajak Hiburan	8.000.000,00	4.950.000,00	61,88
	c. Pajak Reklame	20.000.000,00	19.038.625,00	95,19
	d. Penerangan Jalan	1.008.000.000,00	1.080.006.900,00	107,14
	e. Pengambilan dan Pengolahn Bahan Galian C	413.000.000,00	422.797.334,02	102,37
	f. Pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan	0,00	0,00	0,00
	g. Pajak kendaraan tanpa motor	5.000.000,00	2.330.000,00	46,60
	h. Pajak Hasil Produksi Perkebunan	1.741.000.000,00	1.066.300.579,20	61,25
	i. Pajak pengolahan kapas	0,00	0,00	0,00
	j. Pajak Hasil Bumi, Perairan	325.000.000,00	316.181.000,00	87,56
	k. Peternakan	26.028.000,00	22.789.700,00	96,57
2	Pos Retribusi Daerah			
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.778.844.160,00	1.702.271.411,00	95,70
	b. Persampahan/Kebersihan	116.268.000,00	70.283.900,00	60,45
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Cacatan Sipil	727.000.000,00	447.864.000,00	61,60
	d. Pelayanan Pemakaman	2.000.000,00	1.760.000,00	88,00
	e. Parkir pinggir jalan utama	12.000.000,00	3.433.000,00	28,61
	f. Retribusi pasar	802.500.000,00	752.544.900,00	93,78
	g. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0,00	0,00	0,00
	h. Retribusi pasar grosir	22.500.000,00	9.619.500,00	42,75
	i. Retribusi Terminal	233.000.000,00	216.128.200,00	92,76
	j. Retribusi tempat khusus/parkir kendaraan	231.890.000,00	144.544.300,00	62,33
	k. Retribusi rumah potong hewan	30.240.000,00	26.340.000,00	87,10
	l. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	102.000.000,00	56.608.000,00	55,50
	m. Retribusi Izin mendirikan bangunan	496.000.000,00	400.939.153,05	80,83
	n. Retribusi Izin Gangguan/HO	100.000.000,00	82.963.000,00	82,96
	o. Retribusi Izin Trayek	34.800.000,00	34.840.000,00	100,11
	p. Uang leges	100.000.000,00	115.543.300,00	115,54
	q. Retribusi pangkalan hasil bumi	0,00	0,00	0,00
	r. Izin pengoperasian perusahaan	12.375.000,00	7.146.000,00	57,75
	s. Bongkahan barang	27.500.000,00	23.420.000,00	85,16
	t. Pengangkutan hewan keluar daerah	0,00	0,00	0,00
	u. Ret. Pemakaian jalan daerah	66.100.000,00	44.100.000,00	66,72
	v. Ret. Kesehatan calon mempelai	12.500.000,00	16.580.000,00	132,64
	w. Izin penggunaan jalan	1.500.000,00	1.600.000,00	106,67
	x. Ret. Pengkartuan hewan	0,00	0,00	0,00
	y. Ret. Produksi Kapas	0,00	0,00	0,00
	aa. Ret Iuran pengairan	114.215.000,00	28.847.800,00	25,26
	ab. Ret Izin Pemanfaatan Kayu hutan	50.000.000,00	46.352.500,00	92,71

	ab. Ret Izin Pemanfaatan Kayu hutan	100.000.000,00	105.085.600,00	105,09
	Ac. Penerimaan dari dinas	0,00	0,00	0,00
	ad. Penerimaan dari Kantor informasi dan komunikasi (TV Kabel)	7.500.000,00	1.750.000,00	23,33
3	Bagian Laba Usaha			
	a. Bank Pembangunan Daerah	115.875.000,00	138.866.317,03	119,84
4	Lain-lain Pendapatan			
	a. Pendapatan Jasa Giro	858.401.833,00	954.399.671,00	111,18
	b. Sumbangan pihak ke III	5.000.000,00	6.000.000,00	120,00
	c. Angsuran cicilan kend. Bermotor	0,00	5.798.081,00	0,00
	d. Hasil penjualan barang milik daerah	157.000.000,00	24.387.156,00	15,53
	e. Lain-lain pendapatan	681.713.383,00	2.848.940.620,00	417,91
	f. Penerimaan pengembalian pinjaman kredit permodalan	587.972.827,00	537.347.841,00	91,39
5	Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi	18.821.271.386,00	15.262.972.835,07	81,09
	Bagi Hasil Pajak			
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	10.654.604.945,00	11.637.206.633,99	109,22
	b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.301.560.000,00	1.450.318.546,68	33,72
	c. Bagian dri Kendaraan Bermotor (PKB) dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor	0,00	0,00	0,00
	d. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.640.000.000,00	801.533.339,40	48,87
	e. Pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan (PPH. 21)	1.924.106.441,00	1.316.657.000,00	68,43
	Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a. Iuran Hasil Hutan	250.000.000,00	57.257.315,00	22,90
	b. Pemb. Hak Atas Tanah Negara	1.000.000,00	0,00	0,00
	c. Penerimaan dari iuran eksploitasi/royalti	50.000.000,00	0,00	0,00
	Dana Rutin Daerah	0,00	0,00	0,00
	Bantuan	0,00	0,00	0,00
	Bantuan pembangunan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	a. Bantuan/Sumbangan Kepala Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Kredit	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	184.304.340.000,00		
	Dana Alokasi Umum	0	184.304.340.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus			
	Dana Reboisasi	156.694.000,00	67.467.000,00	43,06
	Dana peningkatan jalan kabupaten	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00
	Jumlah	241.619.542.140,00	233.415.701.064,33	96,60

Tahun 2003

No	Uraian	2003		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah			
	a. Pajak Hotrel dan Restoran	43.860.000,00	17.225.300,00	39,27
	b. Pajak Hiburan	101.379.000,00	73.964.600,00	72,96
	c. Pajak Reklame	4.950.000,00	3.360.500,00	67,89
	d. Penerangan Jalan	20.003.125,00	18.522.055,00	92,60
	e. Pengambilan dan Pengolahn Bahan Galian C	1.415.345.820,00	1.058.747.680,00	74,80
	f. Pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan	346.250.000,00	197.302.060,96	56,98
	g. Pajak kendaraan tanpa motor	4.886.700,00	4.886.500,00	100,00
	h. Pajak Hasil Produksi Perkebunan	716.374.040,00	498.992.015,20	69,66
	i. Pajak pengolahan kapas	0,00	0,00	0,00
	j. Pajak Hasil Bumi dan perairan	260.197.000,00	201.938.000,00	77,61
	k. Peternakan	35.200.000,00	27.075.000,00	76,92
2	Pos Retribusi Daerah			
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.058.744.640,00	2.646.691.172,00	86,53
	b. Persampahan/Kebersihan	122.219.500,00	44.121.500,00	36,10
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Cacatan Sipil	495.000.000,00	388.658.232,00	78,52
	d. Pelayanan Pemakaman	2.070.000,00	2.153.500,00	104,03
	e. Parkir pinggir jalan utama	19.162.500,00	3.632.000,00	18,95
	f. Retribusi pasar	874.769.000,00	806.404.500,00	92,18
	g. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	120.300.000,00	69.875.000,00	58,08
	h. Retribusi pasar grosir	0,00	976.500,00	0,00
	i. Retribusi Terminal	502.057.500,00	262.593.500,00	52,30
	j. Retribusi tempat khusus/parkir kendaraan	102.040.000,00	67.961.300,00	66,60
	k. Retribusi rumah potong hewan	32.850.000,00	17.393.000,00	52,95
	l. Retribusi tempat rekreasi, olah raga	147.000.000,00	118.443.500,00	80,57
	m. Retribusi Izin mendirikan bangunan	504.000.000,00	401.347.793,00	79,63
	n. Retribusi Izin Gangguan/HO	100.000.000,00	96.145.400,00	96,15
	o. Retribusi Izin Trayek	58.306.500,00	38.485.000,00	66,00
	p. Uang leges	1.220.107.000,00	147.836.000,00	12,12
	q. Retribusi pangkalan hasil bumi	0,00	0,00	0,00
	r. Izin pengoperasian perusahaan	12.375.000,00	5.051.000,00	40,82
	s. Bongkahan barang	30.000.000,00	30.720.500,00	102,40
	t. Pengangkutan hewan keluar daerah	53.655.000,00	32.740.000,00	61,02
	u. Ret. Pemakaian jalan daerah	12.500.000,00	21.865.000,00	174,92
	v. Ret. Kesehatan calon mempelai	2.100.000,00	700.000,00	33,33
	w. Izin penggunaan jalan	420.000.000,00	416.640.000,00	99,20
	x. Ret. Pengkartuan hewan	0,00	0,00	0,00
	y. Ret. Produksi Kapas	0,00	0,00	0,00
	aa. Ret luran pengairan	0,00	0,00	0,00
	ab. Ret Izin Pemanfaatan Kayu hutan	100.000.000,00	105.085.600,00	105,09

	ac. Penerimaan dari dinas	12.000.000,00	21.290.500,00	177,42
	ad. Penerimaan dari Kantor informasi dan komunikasi (TV Kabel)	6.000.000,00	3.400.000,00	56,67
3	Bagian Laba Usaha			
	a. Bank Pembangunan Daerah	73.908.500,00	115.875.981,29	156,78
4	Lain-lain Pendapatan			
	a. Pendapatan Jasa Giro	515.424.300,00	858.401.833,00	166,54
	b. Sumbangan pihak ke III	195.500.000,00	170.952.000,00	87,44
	c. Angsuran cicilan kend. Bermotor	6.090.000,00	4.880.000,00	80,13
	d. Hasil penjualan barang milik daerah	157.020.000,00	105.767.001,00	67,36
	e. Lain-lain pendapatan	142.776.000,00	423.539.634,59	296,65
	f. Penerimaan pengembalian pinjaman kredit permodalan	565.537.350,00	326.920.634,59	57,81
5	Bagian Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi yang lebih tinggi	14.714.548.628,00	12.287.270.810,00	83,50
	Bagi Hasil Pajak			
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	7.548.101.172,00	8.882.758.513,29	117,68
	b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.888.593.351,00	1.516.160.247,41	38,99
	c. Bagian dri Kendaraan Bermotor (PKB) dari Bea Balik Nama Kend. Bermotor	0,00	0,00	0,00
	d. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.249.291.000,00	690.075.567,00	55,24
	e. Pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan (PPH. 21)	1.886.821.605,00	948.555.604,00	50,27
	Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a. Iuran Hasil Hutan	79.500.000,00	248.733.759,00	312,87
	b. Pemb. Hak Atas Tanah Negara	2.000.000,00	987.120,00	49,36
	c. Penerimaan dari iuran eksploitasi/royalti	60.241.500,00	0,00	0,00
	Dana Rutin Daerah	0,00	0,00	0,00
	Bantuan	0,00	0,00	0,00
	Bantuan pembangunan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	a. Bantuan/Sumbangan Kepala Desa/ Kelurahan	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Kredit	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum			
	Dana Alokasi Umum	150.637.162.500,00	150.635.493.750,0	100,00
	Dana Alokasi Khusus			
	Dana Reboisasi	0,00	21.118.000,00	0,00
	Dana peningkatan jalan kabupaten	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	190.493.743.066,00	184.519.800.234,44	96,86

Lampiran 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003.

No	Uraian	1999		2000		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	0	0	0	0	0,00
	a. Sub sektor Peternakan					
	b. Sektor lain	1.189.984.596,00	681.923.153,60	1.198.530.080,00	621.973.033,24	51,89
2	Retribusi Daerah					
	a. Sub sektor Peternakan	15.440.000,00	9.182.000,00	18.780.000,00	16.999.000,00	90,52
	b. Sektor lain	2.862.599.500,00	1.960.739.805,00	2.499.110.000,00	1.936.740.664,00	78,08
3	Bagian Laba Usaha Daerah	77.014.152,00	77.014.152,12	73.908.500,00	73.908.567,53	100,00
4	Lain-lain Pendapatan	1.978.974.650,00	468.962.376,50	307.211.713,00	282.883.186,00	92,08
5	Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah/Instansi & Lain-lain	4.020.827.900,00	4.597.476.955,00	54.699.053.122,00	50.796.996.168,42	92,86
		10.144.840.798,00	8.794.398.442,88	58.777.831.086,00	53.726.500619,19	91,41

Lanjutan lampiran 2.

No	Uraian	2001			2002			2003		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	0	0	0,00	26.028.000,00	22.789.700,00	87,56	35.200.000,00	27.075.000,00	76,92
	a. Sub sektor Perumahan									
	b. Sektor lain	2.101.517.400,00	1.409.525.979,00	67,07	3.653.967.000,00	3.001.100.615	82,13	2.878.045.685	2.047.863.711	71,15
2	Retribusi Daerah									
	a. Sub sektor Perumahan	476.170.000,00	477.321.700,00	100,24	30.240.000,00	26.340.000,00	87,10	491.200.000,00	458.313.000,00	93,30
	b. Sektor lain	4.087.796.412,00	3.682.699.897,00	91,29	5.298.573.860,00	4.362.476.194	82,33	6.923.421.790,00	5.494.528.972,00	79,36
3	Bagian Laba Usaha Daerah	73.908.500,00	67.469.251,88	92,40	73.908.500,00	115.875.981,29	156,78	115.875.000,00	138.866.317,03	119,84
4	Lain-lain Pendapatan	1.222.716.400,00	1.129.732.908,31	92,40	1.582.347.650,00	1.890.460.965,59	119,47	2.290.088.043,00	4.376.873.369,00	191,12
5	Pendapatan yang Bersifat dari Pemerintah/Instansi & Lain-lain	128.849.536.300,00	105.063.216.368,98	81,54	165.351.711.128,00	162.943.882.560,70	98,54	209.482.305.386,00	205.834.779.835,00	98,26
		136.811.645.012,00	111.830.017.105,44	81,74	176.016.776.138,00	172.362.936.736,85	97,92	222.216.135.904,00	218.378.300.204,26	98,27



Lanjutan lampiran 2.

No	Uraian	2001		2002		2003		%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pajak Daerah							
	a. Sub sektor Pemukiman	0	0	26.028.000,00	22.789.700,00	34.200.000,00	27.075.000,00	76,92
	b. Sektor lain	2.101.517.400,00	1.409.525.979,00	3.653.967.000,00	3.001.100.615	3.878.045.685	2.047.863.711	71,15
2	Retribusi Daerah							
	a. Sub sektor Pemukiman	476.170.000,00	477.321.700,00	30.240.000,00	26.340.000,00	491.200.000,00	458.313.000,00	93,30
	b. Sektor lain	4.087.796.412,00	3.682.699.897,00	5.298.573.860,00	4.362.476.194	6.923.421.790,00	5.494.528.972,00	79,36
3	Bagian Laba Usaha Daerah	73.908.500,00	67.469.251,88	73.908.500,00	115.875.981,29	115.875.000,00	138.866.317,03	119,84
4	Lain-lain Pendapatan	1.222.716.400,00	1.129.732.908,31	1.582.547.650,00	1.890.460.965,59	2.290.088.043,00	4.376.873.369,00	191,12
5	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Instansi & Lain-lain	128.849.536.300,00	105.063.216.368,98	163.351.711.128,00	162.943.882.560,70	209.482.305.386,00	205.834.779.835,00	98,26
		136.811.645.012,00	111.830.017.105,44	176.016.776.138,00	172.962.926.736,85	222.216.135.904,00	218.378.300.204,26	98,27



Lampiran 3. Target, Realisasi dan Persentase Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1999	15.440.000,00	9.182.000,00	59,47
2000	18.780.000,00	16.999.000,00	90,52
2001	476.170.000,00	477.321.700,00	100,24
2002	30.240.000,00	26.340.000,00	87,10
2003	491.200.000,00	458.313.000,00	93,30
Total	1.031.830.000,00	988.155.700,00	430,63
Rata-rata	206.366.000,00	197.631.140,00	86,13

Lampiran 4. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sub Sektor Peternakan Kabupaten Bulukumba Tahun 1999 Sampai Dengan 2003.

No	Tahun	Total PAD (Rp)	Total Retribusi dan Pajak Ternak (Rp)	Persentase (%)
1	1999	8.794.398.442,88	9.182.000,00	0,05
2	2000	53.726.500619,19	16.999.000,00	0,02
3	2001	111.830.017.105,44	477.321.700,00	0,003
4	2002	172.362.926.736,85	26.340.000,00	0,007
5	2003	218.378.300.204,26	458.313.000,00	0,002
Total		565.092.4-143.108,62	988.155.700,00	0,08
Rata-rata		113.018.428.621,72	197.631.140,00	0,02